

TANTANGAN DAN PELUANG PEMBENTUKAN BANK BUMN SYARIAH DALAM MENYAMBUT ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

^{*)} **Anna Marina,**

Accounting Department, Economic Faculty, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
E-mail: a_m_rina@yahoo.com

^{**)} **Sentot Imam Wahjono,**

Technopreneurship Department, Faculty of Technology Management and Technopreneurship, Universiti
Teknikal Malaysia Melaka.
E-mail: wahjono@utem.edu.my

^{***)} **Ezif Muhammad Fahmi,**

Accounting Department, Economic Faculty, Universitas Muhammadiyah Surabaya
E-mail: eziffahmi@yahoo.com

Abstract

The aim of this study is to conduct a scientific study on the challenges and opportunities of the establishment of Islamic banks in Indonesia, which is majority owned by the State Ownership Corporation (BUMN). During 21 years of operation of Islamic banking in Indonesia accounted for only 5% of the national banking system, while it welcomed the ASEAN Community in 2015 will open opportunities entrants from foreign countries in the Indonesian banking market, especially from Malaysia, which already has a strong Islamic banks and big. Therefore in this paper presented are the challenges and opportunities in establishing Islamic bank with PT Bank BRI Tbk convert into sharia and was soon followed by the acquisition of three other state-owned Islamic bank so that the new Islamic bank(Bank Syariah Indonesia) has the potential to be the largest Islamic bank in the world.

Keywords: ASEAN Economic Community 2015, corporate restructuring, acquisition, Islamic Banking, State Ownership Corporation (BUMN).

Pendahuluan

Dalam ASEAN *Economic Community Blueprint* terdapat kesepakatan bersama tentang adanya produksi dan pasar tunggal yang meliputi 5 elemen inti yaitu: 1) bebas aliran barang, 2) bebas aliran jasa, 3) bebas aliran investasi, 4) bebas aliran modal, 5) bebas aliran tenaga trampil. Sektor-sektor integrasi prioritas, dan makanan, pertanian dan kehutanan juga termasuk dalam pasar tunggal. Dengan akan diberlakukannya Asean Economic Community 2015 yang merupakan percepatan dari Asean Community 2020, maka Indonesia harus lebih menyiapkan dirinya agar dapat meraih manfaat yang sebenarnya.

TANTANGAN DAN PELUANG PEMBENTUKAN BANK BUMN SYARIAH DALAM MENYAMBUT ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

*Balance Economics,
Business,
Management and
Accounting Journal.
Volume X/ No.19/ Juli
2014. Published by
Faculty of Economic
Muhammadiyah
Surabaya
ISSN 1693-9352*

Hal ini menuntut kesiapan pelaku usaha Indonesia untuk bekerja lebih keras dan cerdas lagi, mengingat daya saing industri domestik sangat lemah, karena beberapa faktor. Pertama, masih rendahnya produktifitas ketenagakerjaan yang ada, hasil survei UNDP 2010 menyatakan bahwa produktifitas kerja Indonesia berada di peringkat ke-108 dari 169 negara di dunia atau ranking 6 di negara-negara Asean. Kedua, upah buruh di Indonesia paling rendah se Asean, rata-rata upah buruh di Indonesia USD 0.6 per jam dibanding USD 2.88 per jam di Malaysia, USD 1.04 di Filipina, USD 1.63 di Thailand. Ketiga, tingginya suku bunga komersial yang mencapai 13-15 %, padahal di beberapa negara Asean hanya 4-6 %. Keempat, krisis energi yang sampai kini masih berlangsung di Indonesia, berdampak langsung pada mahalnya harga listrik. Ke lima, tingginya biaya pelabuhan di Indonesia dan masih menggunakan mata uang dollar Amerika, padahal di negara pesaing, dapat menggunakan mata uang setempat.

Dibalik kelemahan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asean tersebut, Indonesia masih punya peluang untuk bersaing dengan negara-negara lain di Asean. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 mencapai 6,6%, yang merupakan tertinggi kedua dunia setelah Cina (8,6%). Berdasarkan studi Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), peningkatan PDB rata-rata negara Asean adalah 5,6% sedang Indonesia mencapai 6,6%. Demikian juga dengan inflasi, di mana pada Desember 2009 dapat dikendalikan pada angka 2,78% yang merupakan inflasi terendah dalam 10 tahun terakhir, meskipun angka itu merambat sampai pada angka 6,96% pada Desember 2010. Bursa Efek Indonesia, saat ini menjadi yang terbaik di antara negara-negara yang tergabung dalam G-20, bahkan yang terbaik se Asia Tenggara, dan nomor dua se Asia Pasifik.

Agar kita dapat mengejar ketertinggalan dengan negara-negara Asean lainnya maka diperlukan dukungan perbankan yang kuat, termasuk perlunya bank syariah yang kuat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim Indonesia atas layanan jasa keuangan syariah.

Analisis dan Pembahasan

a) Profil Perbankan Syariah Indonesia

Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Saat ini, berdasar data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Maret 2013, jumlah perbankan syariah telah bertumbuh dengan pesat yaitu sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 159 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pertumbuhan pesat bank syariah dalam tempo 21 tahun ini difasilitasi dengan baik oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dengan diterbitkan dan diundangkan beberapa peraturan keuangan syariah yang kondusif. Yaitu disyahnkannya UU BI no. 23/1999 dan UU BI

no. 3/2004 serta UU no. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua UU ini memberi ruang yang lapang bagi bertumbuhnya perbankan dan keuangan syariah.

Dari Neraca Gabungan BUS dan UUS (BI, Maret 2013) dapat diketahui bahwa Total Pembiayaan sebesar Rp 161,08 trilyun sedangkan penyerapan Dana Pihak ketiga adalah sebesar Rp 156,96 trilyun hal ini berarti Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 103%. Angka LDR diatas 100% ini menandakan bahwa peranan intermediasi keuangan perbankan syariah adalah tinggi dan signifikan karena sudah melibatkan ekuitas bank dalam pembiayaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam usaha pokok perbankan syariah di Indonesia adalah tinggi. Tidak nampak campur tangan pemerintah dalam mendukung secara langsung misalnya dalam penempatan uang di perbankan syariah termasuk dana-dana yang terhubung langsung dengan ibadah dan ritual umat Islam seperti Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Haji.

Namun peranan perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia masih kecil dan belum signifikan. Total Aset perbankan syariah, sampai Maret 2013, adalah Rp 209,6 Trilyun. Bila dibandingkan dengan total aset perbankan nasional total aset perbankan syariah itu hanya 5%. Total Modal Inti perbankan syariah adalah Rp 7,49 Trilyun. Dari 11 BUS hanya 3 BUS saja yang mempunyai modal inti dalam kategori BUKU II yaitu modal inti antara Rp 1 – Rp 5 Trilyun (BSM, BMI, BNIS), sehingga tidak banyak aktivitas jasa perbankan yang bisa dilakukannya, terbatas hanya pada layanan keuangan segmen ritel dan konsumen dengan kelas UMKM, belum bisa menjangkau segmen industri besar.

b) Tantangan Kompetisi Perbankan Syariah Di Asean

Persaingan bank syariah di Asean bagi Indonesia hanya dengan Malaysia. Di Malaysia, Bank Islam adalah bank syariah pertama dan terbesar saat ini. Didirikan tahun 1983 dan tercatat di papan Bursa Saham Kuala Lumpur tahun 1992. Hal ini berarti Malaysia jauh lebih dahulu dan maju dibanding Indonesia. Saat bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia didirikan (1992), Bank Islam di Malaysia sudah masuk bursa. Sedangkan bank syariah di Indonesia sampai saat ini belum ada yang masuk bursa.

Dengan modal inti awal sekitar Rp 240 milyar, pada tahun 2010 modal inti melonjak menjadi sekitar Rp 8 Trilyun. Dengan menawarkan sekitar 50 produk layanan jasa perbankan syariah dengan 89 cabang di seluruh Malaysia, Bank Islam pada 2010 mencatatkan Pendapatan sekitar Rp 6,7 Trilyun, Rp 4,2 Trilyun diantaranya adalah sebagai Pendapatan Operasi, sedang Pendapatan Bersihnya sebanyak Rp 1,5 Trilyun. Bila dibandingkan dengan perbankan syariah di Indonesia akan Nampak dalam tabel 1 berikut:

TANTANGAN DAN PELUANG PEMBENTUKAN BANK BUMN SYARIAH DALAM MENYAMBUUT ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

*Balance Economics,
Business,
Management and
Accounting Journal.
Volume X/ No.19/ Juli
T14. Published by
Faculty of Economic
Muhammadiyah
Surabaya
ISSN 1693-9352*

Tabel 1. Perbandingan Perbankan Syariah Indonesia-Malaysia posisi 2010.

	Indonesia	Malaysia
Modal Inti/Disetor	5,96 T	8,00 T
Pendapatan Total	11,12 T	6.74 T
Pendapatan Operasi	8,75 T	4,19 T
Pendapatan Bersih	1,30 T	1,56 T
Pendapatan Bersih/Modal	21.81%	19.50%
Banyaknya Bank (BUS)	11	1
Banyaknya Cabang/Kantor	1.215	89
Pendapatan Bersih/Kantor	1,06 M	17,53 M
Jumlah Karyawan	15.224	3.610
Pendapatan Bersih/Karyawan	0,08 M	0,43 M

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Maret 2013, diolah.

Catatan: nilai dalam mata uang rupiah dengan kurs RM 1 = Rp 3.100,00.

Dari sisi modal inti / disetor terlihat bahwa perbankan syariah di Indonesia yang berjumlah 11 BUS itu telah kalah besar dibandingkan dengan hanya 1 bank syariah di Malaysia. Hal ini berdampak pada layanan jasa perbankan syariah yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia sehingga hanya melayani sector usaha kecil dan retail saja, tidak seperti bank Islam Malaysia yang dengan modal inti Rp 8 Trilyun mampu dan dibolehkan melayani jasa keuangan syariah untuk sector korporasi dan infrastruktur yang memerlukan pendanaan besar dan jangka panjang seperti proyek pembangunan lapangan terbang di Sepang Selangor yang menjadi *homebase* Air Asia.

Pendapatan Bersih per kantor, perbankan syariah Indonesia dengan jumlah kantor (BUS saja) sebanyak 1.215 mencatatkan ratio sebesar 1,06M artinya 1 kantor BUS mampu menghasilkan Pendapatan bersih tahunan sebesar Rp 1,06 Milyar. Sedangkan di Malaysia 1 kantor bank syariah mampu menghasilkan Rp 17,53 Milyar. Hal ini merupakan tantangan yang sangat berat dalam meningkatkan keefektifan kantor bank syariah di Indonesia.

Sementara itu, ratio Pendapatan Bersih terhadap jumlah karyawan di Indonesia menunjukkan angka 0,08M artinya 1 karyawan mampu menghasilkan Pendapatan Bersih tahunan sebesar Rp 80 juta, sedang di Malaysia 1 orang karyawan mampu menghasilkan Pendapatan Bersih tahunan sebesar Rp 430 juta. Hal ini mengisyaratkan tingkat efisiensi karyawan perbankan syariah di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi.

c) Peranan Bumh

Peranan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang hanya 4 itu (disebut secara berurutan berdasar besaran Total Aset: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN) adalah sangat besar. Berdasar Statistik Perbankan Nasional posisi Desember 2012 dapat kami rangkum data keuangan pokok perbankan nasional Indonesia sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Bank Umum dan Bank BUMN pada beberapa pos penting.

	Bank Umum	Bank BUMN (Rp T)
Total Aset	4.262,58	1.535,34
Kredit	2.725,67	961,99
Dana Pihak ke-3	3.225,19	1.201,28
Modal Inti	444,54	150,04
Pendapatan	391,28	120,66
Pendapatan/Total Aset	9,17%	7,85%
Pendapatan Operasi	207,56	79,24
Laba Bersih	92,83	40,82
Laba Bersih/Total Aset	2,17%	2,65%
Jumlah Bank	120	4

Sumber: Statistik Perbankan Nasional, BI, 2013, diolah.

Dari segi kepemilikan asset, 4 bank BUMN itu mencatatkan Rp 961,99 Trilyun dibanding 120 bank umum yang beroperasi di Indonesia dengan total asset Rp 2.725,67 Trilyun. Artinya bank BUMN memberi kontribusi 35,29% atas total asset perbankan nasional. Dari segi pengumpulan dana pihak ketiga, bank BUMN mampu mengumpulkan Rp 1.201,28 Trilyun (37,24%) dibanding Rp 3.225,19 Trilyun yang berhasil dikumpulkan perbankan nasional.

Bank BUMN menghasilkan Pendapatan Rp 120,66 Trilyun (30,83%) dibanding Rp 391,28 Trilyun. Sedang dari segi kemampuan menghasilkan laba bersih, bank BUMN menghasilkan Rp 40,82 Trilyun (43,97%) dibanding Rp Rp 92,83 Trilyun.

Dari data di atas nampaklah bahwa peranan bank BUMN sangatlah besar bagi perbankan nasional. Bahwa perbankan BUMN mampu menunjukkan keefektifan pengelolaan dana dengan membandingkan Total Aset yang menguasai 35,29% tetapi mampu memberi kontribusi laba bersih sebesar 43,97%. Sedang dari sisi efisiensi pengelolaan sumber daya perbankan, 4 bank BUMN mampu ratio laba bersih dibanding Total Aset (ROA) sebesar 2,65% lebih besar dibanding ROA bank umum yaitu 2,17%.

d) Restrukturisasi dan Akuisisi

Restrukturisasi korporat adalah serangkaian aktiviti perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Berbagai aktiviti itu adalah dimaksudkan untuk menata kembali bagian bagian dari perusahaan yang bisa saja meliputi asset perusahaan, pendanaan perusahaan, ataupun jenis usaha pokok perusahaan (*core business*). Pada umumnya restrukturisasi korporat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu:

**TANTANGAN DAN
PELUANG
PEMBENTUKAN
BANK BUMN
SYARIAH DALAM
MENYAMBUUT ASEAN
ECONOMIC
COMMUNITY 2015**

*Balance Economics,
Bussines,
Management and
Accounting Journal.
Volume X/ No.19/ Juli
2014. Published by
Faculty of Economic
Muhammadiyah
Surabaya
ISSN 1693-9352*

restrukturisasi portofolio, restrukturisasi keuangan, dan restrukturisasi organisasi (Gaughan, 2011: 389).

Restrukturisasi dalam ranah perbankan bisa meliputi aktivitas melepaskan anak perusahaan (*sister company*) atau merubah jenis usaha pokok bank (*core business*). Termasuk di dalam kategori ini adalah mengkonversi dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan basis Islam (*Islamic banking*).

Alasan melakukan restrukturisasi korporat diantaranya adalah: 1) berhasil diidentifikasi adanya peluang baru (*new opportunities*), 2) terjadinya perubahan akses permodalan dan kebutuhan keuangan, serta 3) perubahan kebijakan pemerintah (*government policy*) sebagai antisipasi atas perubahan tatanan ekonomi dunia (Gaughan, 2011: 447).

Akuisisi adalah pembelian satu atau beberapa perusahaan oleh satu perusahaan lain. Akuisisi dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu entitas bisnis termasuk upaya melindungi entitas bisnis dari serangan perusahaan lain atau untuk memperbesar jangkauan dan bagian pasar (*market share*) sehingga dengan membesarnya bagian pasar dapat membuka peluang bisnis baru misalnya mendapatkan legalitas untuk melayani pasar baru (Angwin, 2007: 4-5).

Bank sebagai *highly regulated institution*, lembaga yang peraturan tingkat tinggi, seperti persyaratan penyaluran kredit, penyediaan jasa perbankan, dan pengembangan produk berdasarkan ketersediaan dan besaran modal yang termasuk dalam Modal Inti. Pembukaan cabang dan kantor juga dilekatkan pada besaran Total Aset.

Banyak hal yang harus disiapkan untuk melakukan restrukturisasi dan akuisisi, diantaranya adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan meminta persetujuan para pemegang saham publik dan minoritas, meminta izin Otoritas Pasar Modal (bila yang melakukan restrukturisasi dan akuisisi adalah perusahaan public yang terdaftar di Bursa) dalam hal ini di Indonesia adalah Bapepam. Hal lain yang perlu dilakukan adalah melakukan penilaian kembali saham (*valuing stock*) dan penilaian kembali nilai perusahaan (*valuing firm*), termasuk melakukan due diligence yang sebaiknya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik berreputasi (*reputable accounting firm*), dan memetakan ulang (*mapping*) produk produk korporat yang akan dilanjutkan setelah proses restrukturisasi dan akuisisi (Bruner, 2004: 243-268).

Meskipun hanya 44% dari kegiatan restrukturisasi dan akuisisi yang direncanakan dengan baik mendeklarasikan sebagai sesuatu kegiatan yang berhasil (Angwin, 2007: 181), namun karena kegiatan restrukturisasi biasa melibatkan jumlah modal dan karyawan yang besar maka seharusnya direncanakan dengan baik dan diformalkan paling tidak dalam bentuk *Teams* atau *task-force* yang mempunyai wewenang yang cukup besar terutama saat pengambilan keputusan penting pada saat mendesak untuk menghindari jebakan birokrasi yang kaku (*rigid*).

e) Peluang Percepatan Pembentukan Bank Syariah Indonesia

Mengingat perkembangan perbankan syariah di Indonesia, meskipun telah berkembang dimana pada tahun 2012 secara *year on year* mengalami pertumbuhan asset yang jauh lebih tinggi (44,15%) dibanding perbankan nasional (15,61%) namun karena kecilnya jumlah total asset perbankan syariah terhadap total asset perbankan umum (4,91%) maka pertumbuhan pesat perbankan syariah itu seperti tidak bermakna. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah percepatan. Kalau di Malaysia langkah-langkah percepatan itu dengan memasukkan Bank Islam ke dalam Bursa, maka untuk mempercepat perkembangan bank syariah Indonesia diperlukan langkah lain.

Salah satu dari langkah percepatan yang kami usulkan adalah mengkonversi salah satu bank BUMN menjadi Bank BUMN Syariah. Bank BUMN yang kami usulkan untuk dikonversi itu adalah Bank BRI, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bank BRI mempunyai asset kedua terbesar setelah Bank Mandiri, yaitu Rp 482,7 Trilyun (per September 2012).
2. Bank BRI mempunyai customer base yang mirip dengan customer base perbankan syariah yaitu: retail, UMKM, pertanian, dan perekonomian rural.
3. Bank BRI juga mempunyai customer yang menggarap bidang infrastruktur dan produksi dan perdagangan produk halal (makanan, minuman, dan obat-obatan).
4. Sebutlah nama baru hasil konversi Bank BRI itu adalah Bank Syariah Indonesia (disingkat: BSI).

Bila tahap pertama dalam mengkonversi Bank BRI telah sukses dijalankan maka langkah berikutnya adalah melakukan akuisisi dengan 4 Bank Umum Syariah yang sebenarnya merupakan sister company dari 4 bank BUMN yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT BRI Syariah, PT BNI Syariah, dan BTN Syariah. Upaya akuisisi ini akan menjadikan BSI mempunyai total asset sebesar Rp 558,70 Trilyun (Rp 482,7 T + Rp 76 T). Dengan total asset sebesar itu akan menjadikan BSI sebagai bank syariah terbesar di Asean mengungguli Bank Islam yang mempunyai total asset saat ini sebesar Rp 175 trilyun. Bahkan berpotensi menjadi bank syariah terbesar di dunia sebab posisi bank syariah terbesar di dunia pada tahun 2011 masih diduduki oleh Bank Melli di Iran mempunyai total asset sekitar Rp 540 trilyun (menurut Asian Banker 2011: USD 54 milyar dengan kurs 1 USD = Rp 10.000,00). Bank Al Rajhi berkantor pusat di Riyadh Arab Saudi mempunyai total asset sekitar Rp 490 trilyun (menurut Asian Banker 2011: USD 49 milyar dengan kurs 1 USD = Rp 10.000,00).

Kedua tahap restrukturisasi PT BRI, Tbk itu dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

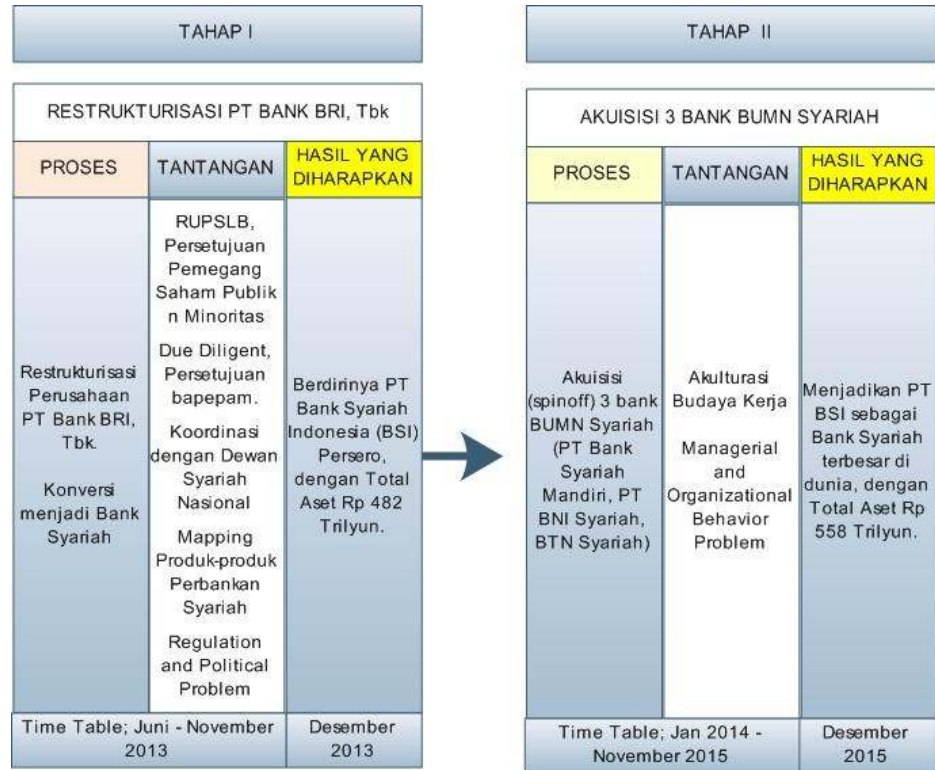
Besarnya total asset, menjadikan BSI mampu membuka beberapa peluang untuk mengembangkan usahanya, diantaranya:

1. Membuka jenis jasa layanan perbankan baru, bukan hanya jasa layanan perbankan untuk ritel, UMKM, pertanian dengan skala kecil dan

TANTANGAN DAN PELUANG PEMBENTUKAN BANK BUMN SYARIAH DALAM MENYAMBUT ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

*Balance Economics,
Business,
Management and
Accounting Journal.
Volume X/ No.19/ Juli
2014. Published by
Faculty of Economic
Muhammadiyah
Surabaya
ISSN 1693-9352*

menengah, tetapi juga jasa layanan perbankan syariah untuk sector bisnis dengan modal besar dan untuk pembiayaan jangka panjang seperti pembiayaan kegiatan infrastruktur: pembangunan jalan tol, pembangunan kawasan industry, pembangunan kota baru, pembangunan lapangan terbang, pembangunan dermaga besar, dan lain-lain.



Gambar 1: Tahap Restrukturisasi PT Bank BRI, Tbk. Yang diusulkan.

2. BSI mampu menjalankan program pemerintah untuk mempercepat pembangunan dengan menutup financing gap dengan memberikan pembiayaan kepada sector sector yang selama ini dijauhi oleh perbankan umum yaitu sector sector yang tidak menjanjikan keuntungan dalam jangka pendek seperti pertanian dan energy. Khusus untuk sector pertanian, Bank BRI mempunyai catatan sejarah panjang membangun sector pertanian meskipun hampir selalu dilakukan dengan kementerian pemerintah.
3. BSI mempunyai peluang untuk melebarkan sayap ke luar negeri dengan membuka cabang dan kantor di tempat tempat potensial yang kondusif terhadap praktek perbankan berbasis Islam seperti di Mekah dan Madinah (prosesi haji dan umrah), di kota-kota industry dan perdagangan di Timur Tengah (Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain, Qatar dan Oman), serta di kota-kota penting di Asia dengan penduduk

mayoritas Islam seperti Teheran, Kuala Lumpur, Baghdad, dan lain-lain. Sehingga internasionalisasi entitas bisnis Indonesia bisa dilakukan oleh BSI. Tidak seperti sekarang meskipun di Indonesia banyak beroperasi bank-bank dari Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Thailand tetapi tidak ada satupun bank nasional mampu membuka cabang di Negara Negara tersebut secara resiprokal.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Melihat tantangan yang besar dalam menyongsong Asean Community 2015 dan mempelajari perkembangan perbankan syariah yang selama 21 tahun masih belum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, maka diperlukan langkah-langkah drastic yang mungkin berupa lompatan (jumping) yaitu melakukan restrukturisasi dalam hal ini mengkonversi PT Bank BRI, Tbk menjadi bank syariah. Berbagai alasan yang secara positif mendukung hal ini sebagai solusi untuk menahan gempuran perbankan syariah dari Malaysia, Iran dan Timur Tengah yang sangat bernafsu untuk memasuki pasar Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Upaya konversi itu sebaiknya dilakukan pada akhir tahun 2013, mengingat tahun 2014 Indonesia mengadakan Pemilihan Umum dengan tekanan politik yang tinggi sehingga banyak pihak termasuk pemerintah tidak berani bersikap, sementara itu tahun 2015 sudah mulai mengaplikasikan Asean community.

Upaya konversi PT Bank BRI, Tbk menjadi bank syariah itu dilanjutkan dengan mengakuisisi 3 bank syariah BUMN sehingga Bank BUMN Syariah yang mungkin akan dinamakan Bank Syariah Indonesia (BSI) itu akan berpotensi menjadi bank syariah dengan prinsip Islam terbesar di dunia karena akan mempunyai Total asset sebesar Rp 558 Trilyun, sementara bank syariah terbesar di dunia (Bank Melli di Iran) mempunyai Total asset setara dengan Rp 540 trilyun. Bila hal itu terjadi akan banyak peluang ikutan yang akan terbuka lebar.

Daftar Pustaka

- Angwin, Duncan. 2007. *Mergers and Acquisitions*. Blackwell Publishing. Singapore.
- Bank Indonesia, Statistik Perbankan Nasional, 2013. http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Indonesia/spi_1212.htm, diunduh tanggal 23Mei 2013.
- Bruner, Robert F. 2004. *Applied Mergers & Acquisitions Workbook*. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey.
- Gaughan, Patrick A. 2011. *Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings*. Fifth Edition John Wiley & Sons, Inc. New Jersey.

TANTANGAN DAN PELUANG PEMBENTUKAN BANK BUMN SYARIAH DALAM MENYAMBUT ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

*Balance Economics,
Business,
Management and
Accounting Journal.
Volume X/ No.19/ Juli
2014. Published by
Faculty of Economic
Muhammadiyah
Surabaya
ISSN 1693-9352*